

Bagaimana Dunia Membuktikan Kebenaran Gagasan Anti-Kekerasan Martin Luther King

Oleh Erica Chenoweth dan Maria J. Stephan
The Washington Post



Oleh: Sudarsan Raghavan

“Saya meninggalkan India dengan keyakinan bahwa perlawanan tanpa kekerasan adalah senjata paling ampuh bagi orang-orang tertindas yang berjuang untuk meraih kemerdekaaananya,” diambil dari buku “The Autobiography of Martin Luther King Jr.” (Otobiografi Martin Luther King Jr) yang diedit oleh Clayborne Carson.

Semenjak tahun 2011, dunia telah menjadi ajang perselisihan. Meskipun serangan pemberontakan bersenjata terjadi di daerah Timur Tengah, Sahel dan Asia bagian Selatan, konflik masyarakat sipil yang menggunakan kekerasan bukanlah cara utama bagi orang-orang untuk memperjuangkan penderitaannya. Sebaliknya, gerakan global yang terjadi mulai dari Tunisia sampai Alun-alun Tahrir di Kairo, Mesir; dari Taman Zuccotti di New York ke Ferguson, Missouri, di Amerika; dari Burkina Faso ke Hong Kong, telah mengambil ajaran-ajaran Mathama Ghandi, Martin Luther King dan para aktivis lainnya baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya mendorong perubahan.

Ide Gandhi dan Martin Luther tentang aksi perlawanan tanpa kekerasan – di mana sekelompok orang tanpa menggunakan senjata melakukan serangkaian mogok, protes, boikot dan aksi-aksi lainnya untuk melawan – tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik bertolak dari kesalahpahaman mengenai apa itu perlawanan masyarakat sipil, sementara yang lainnya meragukan kemampuan masyarakat yang tertekan dan tanpa senjata ketika mereka menghadapi lawan yang kuat. Setiap ada gerakan baru maka tantangan yang baru juga hadir, termasuk ketika keraguan akan efektivitas aksi tanpa kekerasan muncul, terutama ketika menghadapi bentuk penindasan dan kekuasaan yang sistemik dan mengakar. Di tahun 2011, kami menerbitkan sebuah buku yang membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan secara tak terduga menemukan bahwa kampanye gerakan perlawanan tanpa kekerasan memiliki tingkat keberhasilan dua kali lebih besar dari gerakan-gerakan yang melibatkan kekerasan ketika bertujuan untuk menyingkirkan pemimpin-pemimpin politik atau meraih kemerdekaan territorial.

Bagi banyak orang, kesimpulan ini mungkin terlihat naif, namun ketika mengorek data yang ada, kami menemukan bahwa kampanye gerakan tanpa kekerasan berhasil bukan karena mereka mampu meluluhkan hati para lawannya. Sebaliknya, mereka justru berhasil karena metode tanpa kekerasan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengundang partisipasi banyak orang – secara rata-rata, mereka dapat menghadirkan 11 kali lebih banyak orang dibanding metode perlawanan yang menggunakan senjata – dan juga karena metode tanpa kekerasan ini menjadi sumber pergeseran kekuasaan di rezim lawan. Keterlibatan masyarakat yang berasal dari segmen sosial yang berbeda penting karena mereka cenderung memberdayakan dan bisa memilih generasi pembaru, dan pada saat bersamaan berhasil menghentikan dukungan kelompok garis keras. Saat keterlibatan masyarakat bersifat non-kerasan, keadaan ini meningkatkan peluang bagi mereka untuk menarik dukungan dari rezim kepemimpinan, memungkinkan pasukan keamanan, kelompok ekonomi elit dan birokrasi sipil untuk membelot tanpa takut akan adanya tindakan balas dendam yang memakan korban.

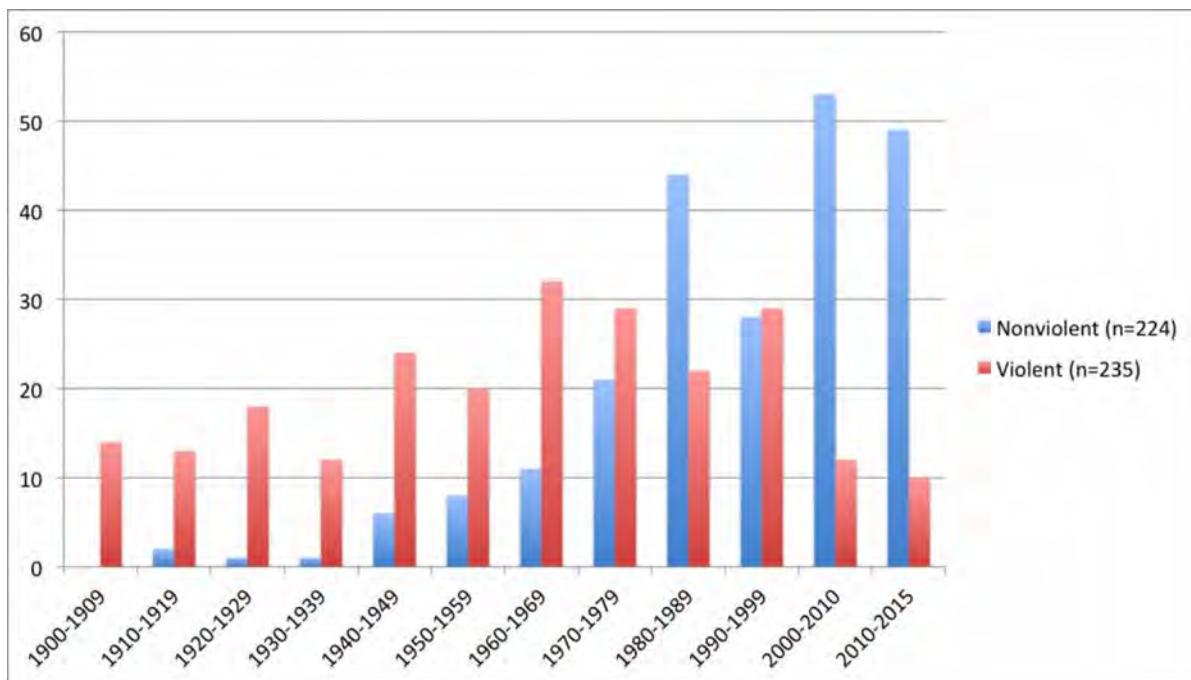
Dengan kata lain, kami menemukan gerakan perlawanan tanpa kekerasan cukup efektif bukan hanya karena kemampuannya untuk mengubah (dukungan masyarakat), tapi juga karena caranya yang kreatif dalam membujuk dan meyakinkan -sebuah teori yang diutarakan oleh pendiri Insitusi Albert Einstein Gene Sharp selama beberapa dekade terakhir.

Tentunya, tidak semua kampanye gerakan tanpa kekerasan berhasil. Namun ketika mereka gagal, tidak ada bukti sistemik yang kuat yang mampu membuktikan bahwa aksi pemberontakan dengan kekerasan akan memberikan hasil yang lebih baik.

Itu yang terjadi di tahun 2011. Sekarang tahun 2016. Apa yang telah kita pelajari tentang gerakan perlawanan tanpa kekerasan selama lima tahun belakangan ? Di bawah ini, kami memberikan beberapa gambaran mengenai kesimpulan-kesimpulan kunci yang bersifat empiris yang diambil dari ilmu politik, yang beberapa diantaranya menunjukkan hasil yang tak terduga bagi kelompok yang meragukan keefektifan aksi tanpa kekerasan ini.

1. Kampanye gerakan tanpa kekerasan menjadi semakin umum

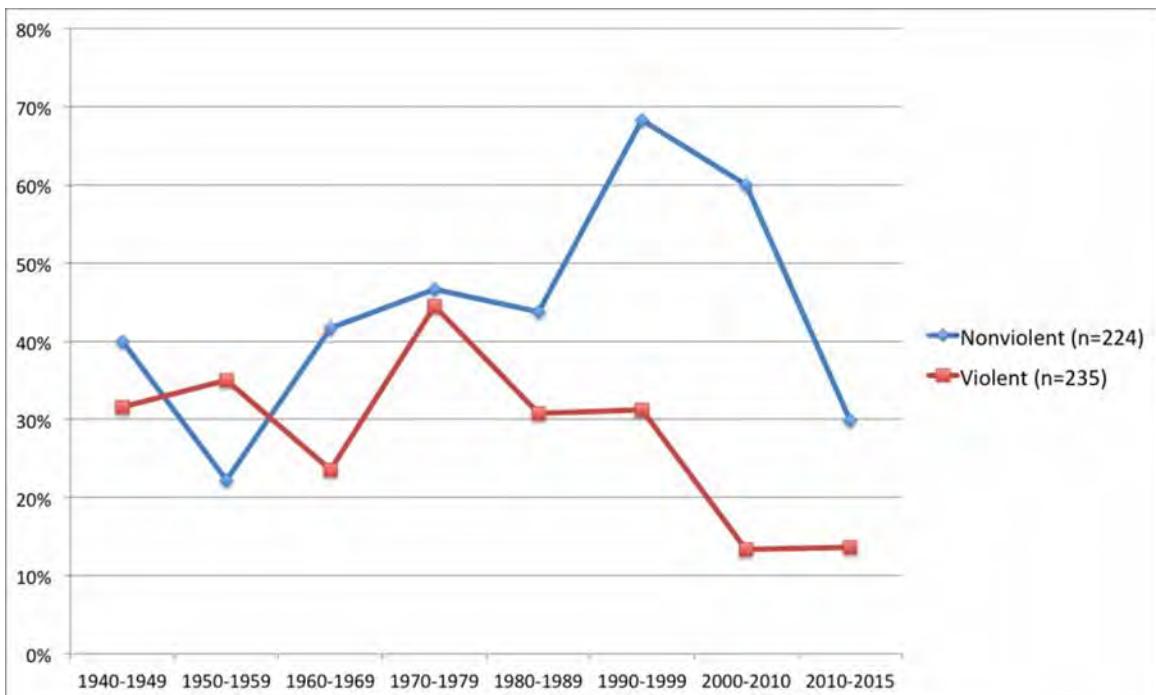
Jika Anda merasa kita tinggal dalam sebuah era yang penuh gangguan dalam catatan sejarah, dugaan anda benar. Tapi, gangguan di zaman kita unik. Sebuah proyek berjudul Episode Besar dari Perselisihan (The Major Episodes of Contention project) (sebuah proyek data yang dilakukan oleh professor Erica Chenoweth di Universitas Denver) menunjukkan bahwa kampanye gerakan perlawanan tanpa kekerasan telah masuk dalam kategori aksi perselisihan yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Proyek Data NAVCO, yang merupakan proyek pengumpulan data yang menggunakan sumber materi dan kriteria yang berbeda, juga menunjukkan pola yang sama. Keadaan yang sama juga ditemukan pada serangkaian data yang berbeda tentang gerakan protes. Jika jumlah gerakan pemberontakan dengan kekerasaan – ditandai dengan jumlah korban yang jatuh sejumlah 1000 orang – menurun sejak era 1970-an, maka jumlah kampanye gerakan tanpa kekerasan justru meroket. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini merujuk khususnya pada kampanye yang dilakukan untuk tujuan yang maksimal, yakni untuk menggulingkan pemimpin yang berkuasa atau untuk mendirikan negara merdeka dengan cara memisahkan diri atau dengan mengusir para penjajah atau penguasa militer asing.



Lima tahun pertama dalam dekade ini, kami telah melihat semakin banyaknya bentuk kampanye anti kekerasan yang baru dibanding yang terjadi di sepanjang era 1990-an, dan jumlahnya hampir sama banyaknya dengan yang ditemukan pada era 2000-an. Dasawarsa ini berada dalam jalur untuk menjadi dekade yang penuh dengan perselisihan dalam catatan sejarah.

2. Meskipun gerakan perlawanan tanpa kekerasan saat ini jamak ditemukan, tingkat kesuksesannya telah menurun

Dengan meningkatnya kampanye anti kekerasan, kami juga melihat masih banyak yang perlu dipelajari. Tingkat keberhasilan gerakan perlawanan tanpa kekerasan meningkat di era 1990-an, namun di dekade sekarang ini terjadi penurunan tajam pada tingkat keberhasilannya.



Ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Alasan pertama, pihak lawan dari mungkin mempelajari dan beradaptasi terhadap segala bentuk tantangan dari bawah. Beberapa dekade sebelumnya, penguasa telah meremehkan kemampuan masyarakat dalam mengancam keberadaan mereka, namun saat ini pihak pemerintah mulai melihat kampanye anti kekerasan yang melibatkan massa sebagai sesuatu yang mengancam. Hal ini mendorong mereka berupaya mencegahnya—mungkin dengan mengikuti daftar kesimpulan yang didapat dari “Dictator Handbook” (Pedoman Diktator) yang ditulis oleh Bruce Bueno de Mesquita dan Alastair Smith – atau dengan mengerahkan strategi penindasan yang cerdas untuk menumbangkan gerakan masyarakat ketika mereka bangkit. Fenomena tentang proses adaptasi yang dipelajari oleh penguasa—atau apa yang disebut sebagai pemerintahan otoritarian 2.0. oleh Steven Heydemann, seorang profesor studi Timur Tengah di sebuah organisasi yang didirikan oleh tokoh filantropi Jane Wright Ketcham di Universitas Smith di Amerika. Bentuk pemerintahan ini adalah fokus utama proyek tentang masa depan pemerintahan otoritarian yang dilakukan badan penelitian Atlantic Council.

Kedua, para aktivis yang melakukan aksi gerakan perlawanan tanpa kekerasan mungkin belajar dari kesalahan rekan-rekannya di seluruh dunia. Sebagai contoh, seseorang mungkin tergoda untuk berpikir bahwa demonstrasi yang berlangsung selama tiga minggu dapat menumbangkan seorang diktator seperti yang terjadi pada gerakan

mogok dan demonstrasi di Tunisia di tahun 2010 dan 2011. Namun, pemahaman seperti itu mengabaikan fakta bahwa Tunisia memiliki sejarah yang unik terkait dengan organisasi buruhnya yang menjadi kunci dari gerakan pemberontakan ini. Ketika gerakan mogok yang dilakukan organisasi buruh ini mengancam untuk melumpuhkan kegiatan ekonomi negara Tunisia, maka kelompok ekonomi elit dan para pebisnis mulai menarik dukungannya terhadap presiden Zine el Abidine Ben Ali. Hal yang sama terjadi juga pada pasukan keamanan yang menentang perintah presiden untuk menyerang para demonstran dengan senjata otomatis.

Wajar bagi para aktivis untuk mengambil inspirasi dari gerakan lain yang mengalami hal serupa, namun hal ini bisa saja berakhir dengan kegagalan. Sebagai contoh, Kurt Weyland dari Universitas Texas menunjukkan bahwa saat adanya gelombang revolusi yang menggunakan kekerasan melanda dunia di tahun 1848, kelompok pembangkang berupaya meniru strategi yang dilakukan oleh gerakan pemberontakan sebelumnya yang menentang penguasa kerajaan Perancis. Namun, gerakan pemberontakan ini digagalkan oleh pihak monarki yang merupakan wujud musuh yang berbeda karena mereka lebih siap dan memiliki sumber daya lebih banyak dibanding penguasa Perancis dalam memberantas gerakan pemberontakan. Pada gelombang pemberontakan berikutnya, pihak penguasa dapat mengantisipasi gerakan revolusioner dengan menghancurkan gerakan pemberontakan serta memecah belah lawan untuk kepentingan mereka. Kita mungkin melihat dinamika yang serupa saat ini, khususnya yang terjadi dalam gelombang akhir pemberontakan di wilayah regional.

3. Namun, percaya atau tidak, kampanye gerakan anti kekerasan lebih cenderung berhasil jika dibandingkan dengan gerakan yang menggunakan kekerasan

Secara mutlak, tingkat keberhasilan kampanye yang melibatkan kekerasan lebih rendah dibanding dengan kampanye yang menggunakan anti kekerasan sejak tahun 1960. Pada kenyataannya, secara keseluruhan dari tahun 1900 sampai tahun 2015, tingkat keberhasilan kampanye anti kekerasan mencapai 51 persen sedangkan yang menggunakan kekerasan hanya 27 persen. Sejauh ini, 30 persen kampanye tanpa kekerasan yang terjadi di dekade ini telah menunjukkan keberhasilan, sementara hanya 12 persen dari kampanye yang melibatkan kekerasan yang berhasil – yang artinya

kesenjangan tingkat keberhasilan di antara kedua metode tersebut sebenarnya lebih besar dari rata-rata.

4. Penggunaan kekerasan merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi gerakan masyarakat tanpa kekerasan

Salah satu perdebatan terpanas sejak tahun 2011 melibatkan pertanyaan apakah penggunaan sedikit kekerasan dalam kampanye tak bersenjata akan menolong atau mencederai gerakan anti kekerasan itu sendiri. Pernyataan sejenis ini juga ditemukan dalam debat mengenai “keanekaragaman taktik” di Amerika. Tapi pertanyaan mengenai penggunaan metode perlawanan dengan atau tanpa kekerasan atau kombinasi di antaranya adalah hal yang umum didapati pada banyak gerakan yang mencari perubahan radikal di seluruh dunia. Meskipun banyak klaim, baik yang pro maupun kontra, yang diutarakan baik para pengamat, ahli dan juga aktivis, pertanyaan ini mendapatkan evaluasi empiris yang sedikit serius baru-baru saja.

Dalam sebuah artikel terkini yang berjudul “Pengerahan” (Mobilization), penulis Chenoweth dan Kurt Schock dari Universitas Rutgers menggunakan data perbandingan untuk meneliti keterbatasan penggunaan kekerasan. Mereka menemukan bahwa elemen kekerasan bisa membantu meraih tujuan jangka pendek seperti mendapatkan perhatian dari media, membangun persepsi bahwa gerakan tersebut membela diri dan penyebaran budaya perlawanan yang membangun komitmen antar anggota radikal, atau semacam katarsis untuk “meredakan ketegangan”.

Namun, penggunaan kekerasan biasanya menghalangi gerakan anti kekerasan dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang seperti mendapatkan dukungan partisipasi yang semakin besar dan beragam, memperluas dukungan dari pihak ketiga dan mendorong pasukan keamanan untuk membelot. Mereka menemukan bukti bahwa penggunaan kekerasan biasanya berhubungan dengan tingkat partisipasi yang rendah dan cenderung sama, yang pada dasarnya mengabaikan tujuan utama gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Penelitian yang lain menunjukkan hal yang serupa bahwa penggunaan kekerasan cenderung meningkatkan penindasan dari pemerintahan karena cenderung berhubungan dengan rendahnya tingkat partisipasi. Jadi, kesimpulannya penggunaan kekerasan tidak membantu keberhasilan kampanye anti kekerasan.

Omar Wasow dari Universitas Princeton menunjukkan bukti lebih lanjut tentang akibat politis dari gerakan protes baik yang melibatkan kekerasan maupun tidak. Dengan menggunakan data terkait gerakan protes urban yang dilakukan masyarakat kulit hitam di tahun 1960, Wasow dengan menyakinkan menunjukkan bahwa semakin seringnya gerakan protes tanpa kekerasan terjadi maka yang menjadi isu utama di ranah publik di Amerika Serikat adalah lahirnya dukungan yang lebih besar untuk penegakan hak-hak masyarakat sipil, sementara itu jika yang sering terjadi adalah gerakan protes yang melibatkan kekerasan, maka yang menjadi isu utamanya adalah bagaimana menciptakan ketertiban umum. Setelah tahun 1965, ketika gerakan protes dengan kekerasan semakin umum, opini publik mulai beralih dari pemberian dukungan untuk penegakan hak-hak masyarakat sipil ke pemberian dukungan ke pihak polisi. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut tidak lagi menambah daya tariknya untuk menarik pendukung.

Hal yang mencolok, opini publik tersebut memiliki pengaruh tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Wasow menemukan bahwa dukungan untuk menciptakan ketertiban dan hukum sangat berhubungan dekat dengan banyaknya suara untuk kepemimpinan partai Republik. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari bentuk gerakan protes yang berbeda akan memiliki efek politik yang berkelanjutan di Amerika Serikat.

5. Konflik-konflik tanpa kekerasan semakin sulit diprediksi

Seluruh bidang ilmu sosiologi telah lama menunjukkan perhatiannya terhadap pertanyaan kapan gerakan-gerakan sosial atau gerakan-gerakan protes terjadi. Kampanye gerakan perlawanan tanpa kekerasan untuk tujuan yang maksimal adalah hal yang benar-benar berbeda, karena mereka mengandalkan serangkaian aksi yang sangat mengganggu dan terkoordinasi untuk melawan pihak pemerintahan dengan tujuan untuk menumbangkan status quo di tingkat nasional. Penelitian-penelitian yang mengevaluasi penyebab gerakan perlawanan tanpa kekerasan telah mengidentifikasi beberapa korelasi metode gerakan ini dengan kepadatan sektor manufaktur (Butcher & Svensson 2014), emosi (Pearlman 2013), kedekatan geografis (Gleditsch & Rivera 2015), dan sejarah gerakan protes (Braithwaite, Braithwaite, & Kubik 2015).

Di tahun 2015, Chenoweth dan Jay Ulfelder mengevaluasi berbagai teori umum yang membahas gerakan pemberontakan yang melibatkan massa dan menemukan bahwa sedikit dari mereka yang secara akurat memprediksi kapan kampanye-kampanye anti kekerasan akan muncul. Tidak seperti kampanye bersenjata, kudeta atau kejatuhan pemerintahan - dimana semuanya bisa diprediksi oleh para ilmuwan dengan jitu – kampanye massa anti kekerasan bisa terjadi hampir di mana saja untuk alasan apapun. Kampanye jenis ini sering terjadi di tempat-tempat yang menurut para ilmuwan sulit mengerahkan para pemberontak, apalagi secara efektif. Sebenarnya tidak jelas apa yang memicu mereka untuk terus bertahan. Chenoweth dan Ulfelder menyimpulkan bahwa gerakan yang melibatkan kekuatan massa pada dasarnya sangat kontekstual dan tidak dapat diprediksi sehingga alat untuk meramal berikut struktur datanya tidak dapat menentukan kapan gerakan itu terjadi. Cara lain untuk menafsirkan temuan ini adalah bahwa orang yang mengatur gerakan pemberontakan tanpa kekerasan ini sering kali mengatasi kondisi buruk dengan cara-cara kreatif yang berbeda dengan yang diharapkan. Penafsiran ini kemudian membawa kita ke poin terakhir.

6. Penindasan menantang semua bentuk kampanye pemberontakan tapi tidak lantas menentukan bentuk perlawanan tanpa kekerasan ataupun hasilnya

Satu argumen terkenal mengenai gerakan perlawanan tanpa kekerasan adalah hal ini bisa terjadi dan bahkan cenderung berhasil sejauh lawan bersikap baik. Tapi begitu pihak lawan berubah sikap, maka gerakan perlawanan tanpa kekerasan akan menjadi mustahil dan sia-sia. Kami membahas sedikit argumen ini di buku yang diterbitkan tahun 2011, tapi beberapa karya terbaru juga membahas isu penting ini.

Dalam kaitannya apakah tindakan penindasan brutal akan mempengaruhi terjadinya gerakan perlawanan tanpa kekerasan, Wendy Pearlman mengungkapkan pendapatnya di bukunya yang bagus mengenai gerakan nasional orang Palestina. Dia mengatakan bahwa gerakan penindasan tidak bisa menjelaskan alasan kenapa sebuah gerakan berubah menggunakan kekerasan dari yang awalnya tanpa kekerasan. Dia berpendapat bahwa, pada kenyataannya, penindasan yang terjadi ketika gerakan pemberontakan (First Intifada) tidak menggunakan kekerasan sama hebatnya dengan yang terjadi ketika gerakan pemberontakan menggunakan kekerasan. Sebaliknya, dia berpendapat, tingginya semangat persatuan di antara para pemberontak dapat menjelaskan dengan

baik bagaimana gerakan itu bisa berubah menggunakan kekerasan. Ketika sebuah gerakan dirasuki visi kebersamaan, bentuk kepemimpinan dan juga norma-norma dan aturan-aturan internal yang jelas, gerakan tersebut bisa terus mengandalkan metode perlawanan tanpa kekerasan meski ada penindasan terus menerus dari pemerintah Israel.

Peneliti Jonathan Sutton, Charles Butcher dan Isak Svensson juga merujuk pada struktur gerakan dan organisasi sebagai penentu utama kemampuan sebuah gerakan kampanye ketika menghadapi penindasan. Mereka menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan bahwa ketika pemerintahan yang berkuasa menggunakan bentuk kekerasan sepihak atau melakukan pembunuhan massal untuk mengatasi para demonstran yang tidak bersenjata, para demonstrator ini akan berhasil untuk jangka waktu panjang ketika mereka adalah bagian dari sebuah gerakan kampanye yang besar dan terorganisir.

Tentu saja, beberapa penelitian juga meragukan kemampuan pihak oposisi yang menggunakan metode anti kekerasan dalam menghadapi rezim penindas yang sangat canggih – khususnya rezim yang memiliki ambisi melakukan genosida dan pembunuhan dengan alasan politik. Karya Christopher baru-baru ini tentang upaya pasukan keamanan Guatemala dalam membubarkan gerakan oposisi kiri antara tahun 1975 dan 1985 adalah sebuah peringatan tentang bagaimana komitmen sebuah rezim dalam menghadapi gerakan pemberontak. Sama seperti yang terjadi ketika pembunuhan brutal dan terencana yang dilakukan rezim Bashar al-Assad kepada para pembangkang yang terlibat dalam gerakan anti kekerasan setelah gerakan protes di Deraa pada Maret 2011 – tindakan tersebut adalah sebuah bukti kuat mengapa bentuk kampanye yang melibatkan massa dan metode anti kekerasan memiliki peluang yang sama baik untuk gagal atau berhasil.

Tapi kemudian, sulit untuk memprediksi kapan birokrasi penindas semacam itu akan dapat menuntut kesetiaan bawahannya untuk menghadapi gerakan pemberontak – bahkan dalam kasus yang kelihatannya tidak mungkin seperti di Suriah. Selain itu, dalam karyanya yang akan datang, Lee Smithey, Lester Kurtz dan para kolaborator menemukan bahwa pendekatan yang dilakukan rezim penindas untuk melawan para pengunjuk rasa yang tak bersenjata bisa menjadi bumerang bagi rezim itu sendiri, ketika perbuatan mereka menimbulkan kemarahan publik, dan kemudian menarik makin banyak

simpatisan untuk kaum oposisi, menciptakan dukungan dari pihak ketiga dan mempercepat adanya pembelotan dari pasukan keamanan. Pada kenyataannya, episode-episode penindasan lebih sering menjadi penyebab awal kampanye anti kekerasan dan bukan penentu akhirnya. Terlintas dalam pikiran, pembunuhan Emmet Till sebagai contoh dimana sebuah episode kekerasan yang mengerikan bisa menghasilkan dukungan, simpati dan partisipasi untuk gerakan yang mendukung hak-hak sipil masyarakat di Amerika Serikat.

Terkait dengan peringatan hari Martin Luther King Jr, kami berpikir untuk memberikan sebuah pesan mendalam dari surat Martin Luther King Jr yang berjudul “Surat dari Penjara Birmingham”, yang isi komplitnya bisa dibaca dibawah ini:

“Sobat-sobatku, saya harus mengatakan kepada kalian bahwa kita belum mendapatkan hasil dalam upaya penegakan hak-hak sipil tanpa adanya desakan penggunaan metode anti kekerasan yang bersifat legal. Yang disesalkan adalah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kelompok kelompok yang memiliki hak-hak istimewa jarang memberikan hak-hak mereka itu secara sukarela. Individu-individu mungkin melihat cahaya moral dan dengan sukarela melepaskan sikap tidak adil mereka, namun seperti yang diingatkan oleh Reinholt Niebuhr, kelompok-kelompok justru cenderung lebih tidak bermoral ketimbang individu-individu. Kita mengetahuinya lewat pengalaman menyakitkan yang menunjukkan bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh pihak penindas tapi kebebasan harus dituntut oleh yang tertindas.”

Tentu saja, Martin Luther King Jr. merasa prihatin dengan dimensi pragmatis dan moral dari gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Tapi pandangan pragmatisnya tidak seharusnya diremehkan, sebagaimana ketika buku Jonathan Rieder tentang surat-surat yang ditulis Martin Luther King di Birmingham sampai ke masyarakat lokal.

Jelasnya, banyak sekali yang harus dipelajari mengenai gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Gerakan ini merupakan fenomena yang bermunculan, dan penelitian atas topik ini akan terus bermunculan dalam ilmu-ilmu sosial. Orang-orang yang ingin melawan penindasan akan diuntungkan dengan adanya penelitian yang lebih sistematik tentang kapan dan bagaimana melakukan aksi tanpa kekerasan di berbagai konteks. Pembuat kebijakan yang berusaha menjawab tantangan dari munculnya

kepemerintahan otoriter ke rapuhnya sistem pemerintahan sampai ke gerakan ekstremisme keras akan diuntungkan juga dari adanya pemahaman mendalam tentang kapan dan bagaimana sebuah gerakan anti kekerasan berhasil – dan apa yang artinya ketika kita memberi dukungan secara efektif.

Pada dekade ini—di mana semakin banyak orang menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan dibanding era sebelumnya – para ilmuwan dan praktisi akan bersama-sama melakukan konsultasi dengan baik mengenai ajaran Mathama Gandhi dan Martin Luther King yang pragmatis dan berprinsip untuk membangun jalan ke depan. []

Erica Chenoweth adalah seorang profesor di Sekolah Studi Internasional Josef Korbel di Universitas Denver dan seorang anggota yayasan One Earth Future (Masa Depan Satu Bumi). Dia juga menulis untuk Rational Insurgent dan membantu mengurusi blog *Political Violence @a Glance (Kekerasan Politik @ Sekilas)* yang sering mendapatkan penghargaan. Sesekali menulis untuk kolom *The Monkey Cage (Sangkar Monyet)*. Maria J. Stephan adalah anggota senior dari Institusi Perdamaian Amerika Serikat dan anggota senior non residensi di lembaga penelitian Atlantic Council.